



Diplomasi Pertahanan Indonesia di Tengah Ketidakpastian Regional: Antara Netralitas dan Keterlibatan Strategis (2023-2025)

Descenda Angelia Putri^{1*}, Syaiful Anwar², Sudibyo³

^{1,2,3} Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 19, 2025

Revised October 02, 2025

Accepted October 03, 2025

Available online October 03, 2025

Kata Kunci :

Diplomasi Pertahanan, Politik Bebas Aktif, VUKA, Indo-Pasifik.

Keywords:

Defense Diplomacy, Free and Active Foreign Policy, VUCA, IndoPacific.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Descenda Angelia Putri, Syaiful Anwar, Sudibyo. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji diplomasi pertahanan Indonesia di tengah ketidakpastian regional di kawasan Indo-Pasifik pada periode 2023 hingga 2025, dengan fokus pada upaya menjaga keseimbangan antara netralitas dan keterlibatan strategis. Isu utama yang dibahas meliputi meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sengketa di Laut China Selatan, serta munculnya aliansi keamanan baru seperti AUKUS yang menciptakan kondisi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUKA). Kajian literatur penelitian ini mencakup teori kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, dan diplomasi pertahanan, serta prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang menjadi dasar diplomasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi dokumen yang mencakup publikasi pemerintah, laporan ASEAN, literatur akademik, dan media daring yang kredibel. Analisis dilakukan secara tematik dan content analysis dengan triangulasi sumber untuk menjamin validitas. Tantangan signifikan masih terlihat pada fragmentasi institusional dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan perlunya kebijakan yang fleksibel, adaptif, peningkatan koordinasi domestik, serta penguatan kerja sama multilateral untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas kawasan tanpa mengorbankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.

ABSTRACT

This study examines Indonesia's defense diplomacy amid regional uncertainty in the Indo-Pacific between 2023 and 2025, focusing on the balance between neutrality and strategic engagement. The research addresses key issues such as the intensifying U.S.–China rivalry, South China Sea disputes, and the emergence of new security arrangements like AUKUS, all of which create a volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA) environment. The literature review draws upon theories of national interest, foreign policy, and defense diplomacy, as well as the principle of Indonesia's free and active foreign policy. It highlights the importance of ASEAN-led frameworks, particularly ADMM-Plus, in fostering regional stability. Methodologically, the study adopts a qualitative descriptive approach using document analysis of government publications, ASEAN reports, academic literature, and credible media sources. Institutional fragmentation and weak inter-agency coordination remain major challenges. The study concludes that Indonesia's defense diplomacy requires flexible, adaptive policies, stronger domestic coordination, and expanded multilateral cooperation to safeguard national interests and maintain regional stability without compromising its free and active foreign policy.

1. PENDAHULUAN

Pada periode 2023-2025, kawasan Indo-Pasifik menghadapi ketegangan geopolitik yang semakin meningkat. Rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok menjadi faktor utama yang mempengaruhi stabilitas kawasan tersebut. Ketegangan ini semakin jelas dalam sengketa Laut China Selatan, di mana ada klaim teritorial yang tumpang tindih antara beberapa negara seperti Tiongkok, Filipina, dan Vietnam (Wicaksana, 2025; Manurung et al., 2025). Selain itu, ketegangan militer yang terus berkembang menambah kompleksitas situasi geopolitik ini. Aliansi keamanan baru, seperti AUKUS yang terdiri dari Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, turut memperburuk ketidakpastian di kawasan, memaksa negara-negara

*Corresponding author

E-mail addresses: adescenda@gmail.com (Descenda Angelia Putri)

di Indo-Pasifik untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka dengan dinamika yang semakin penuh tantangan (Goh, 2023).

Dalam konteks tersebut, Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki kepentingan strategis terkait dengan keamanan maritim, terutama di Selat Malaka dan Laut China Selatan yang merupakan jalur perdagangan internasional vital. Indonesia harus memastikan kebebasan navigasi di wilayah tersebut dan menjaga kestabilan regional. Kepentingan maritim yang semakin mendesak ini harus dipertimbangkan dengan cermat dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan diplomasi pertahanan Indonesia agar dapat menghadapi tantangan yang ada.

Namun, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan prinsip kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif (*free and active foreign policy*). Meskipun Indonesia memiliki kepentingan yang besar dalam menjaga keamanan kawasan, negara ini harus berhati-hati dalam menjaga netralitas di tengah persaingan global yang semakin tajam. Kebijakan luar negeri Indonesia menekankan prinsip tidak memihak dan menghindari keterlibatan dalam aliansi militer yang dapat membahayakan independensi negara ini. Tantangan ini semakin kompleks karena Indonesia harus menyeimbangkan kepentingan nasional dengan prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negeri yang selama ini dijalankan (Kamil, 2022).

Selain itu, Indonesia kini juga dihadapkan dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity*). Ketidakpastian ini mempengaruhi kebijakan luar negeri dan diplomasi pertahanan Indonesia, yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang sangat dinamis. Dalam konteks VUCA, Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik harus membuat keputusan di tengah ketidakpastian yang besar, seperti perubahan aliansi internasional, ketegangan antara AS dan Tiongkok, serta ancaman baru seperti perubahan iklim yang memengaruhi stabilitas kawasan (Kaplan, 2023). Oleh karena itu, Indonesia harus mengembangkan kebijakan luar negeri yang fleksibel, adaptif, dan responsif agar dapat melindungi kepentingan nasionalnya serta menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain tanpa kehilangan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif.

2. KAJIAN LITERATUR

Konsep Diplomasi Pertahanan

Diplomasi pertahanan merujuk pada usaha negara dalam memanfaatkan instrumen kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik luar negeri, serta menjaga stabilitas keamanan melalui berbagai saluran diplomatik dan kerjasama internasional. (Cotter & Forster, 2004) mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai “strategi negara dalam menggunakan alat militer dan non-militer untuk membangun hubungan antarnegara yang mendukung kebijakan luar negeri negara tersebut.” Konsep ini sejalan dengan pandangan (Bellamy, 2011), yang menekankan pentingnya diplomasi pertahanan dalam menciptakan pengaruh internasional serta memperkuat posisi negara dalam perundingan multilateral.

Menurut Bellamy, diplomasi pertahanan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen, antara lain latihan militer bersama, kunjungan pejabat militer antarnegara, serta pertukaran pendidikan militer. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan dan membangun kerjasama antara negara-negara dalam rangka mencapai tujuan strategis bersama (Cotter & Forster, 2004). Kegiatan tersebut juga berperan penting dalam meningkatkan interoperabilitas dan kesiapsiagaan militer di tingkat regional maupun internasional.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Indonesia mengadopsi prinsip politik luar negeri bebas-aktif (*free and active foreign policy*), yang pertama kali dirumuskan dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955. Prinsip ini menekankan pada kebijakan luar negeri yang bebas dari dominasi kekuatan asing dan aktif berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia memanfaatkan prinsip ini untuk memperkuat posisi diplomasi pertahanannya, terutama dalam menghadapi ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Peran Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk ASEAN, serta dalam kerjasama militer dengan negara-negara besar, menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia sangat mendukung diplomasi pertahanan yang independen dan proaktif (Rini, 2022).

Selain itu, Indonesia juga mengembangkan kebijakan pertahanan nasionalnya melalui dokumen *Defense White Paper* dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah*

Nasional (RPJM). Dalam *Defense White Paper* Indonesia, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2015 dan diperbarui pada tahun 2020, ditekankan bahwa Indonesia harus mempertahankan prinsip netralitas namun tetap terlibat dalam kerjasama keamanan untuk memperkuat ketahanan nasional. Dalam RPJM, Indonesia mengintegrasikan berbagai strategi pertahanan, termasuk peningkatan kapasitas militer dan diplomasi pertahanan yang aktif (Setiawan, 2023).

Konteks Regional

Dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik pada 2023 hingga 2025 menunjukkan ketegangan yang meningkat, dengan persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China, serta potensi konflik terkait klaim wilayah di Laut China Selatan. Ketidakpastian geopolitik ini menjadi tantangan bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara netralitas dan keterlibatan dalam kerjasama keamanan regional.

ASEAN, sebagai organisasi regional yang terdiri dari sepuluh negara anggota, memainkan peran kunci dalam meredakan ketegangan di kawasan ini (Laksmiana, 2023; Mamentu et al., 2023). Salah satu platform yang berfungsi dalam diplomasi pertahanan adalah ADMM-Plus (*ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus*), yang melibatkan negara-negara ASEAN dan delapan mitra dialog utama, termasuk Amerika Serikat, China, dan Rusia. Sejak berdirinya, ADMM-Plus berfungsi sebagai forum untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan melalui latihan militer bersama, pertukaran informasi, serta pembahasan isu-isu strategis (Sugianto, 2023). Diplomasi pertahanan Indonesia dalam forum ini mencerminkan komitmennya untuk menciptakan stabilitas regional tanpa terlibat dalam aliansi militer yang mengarah pada polarisasi internasional.

Teori Kepentingan Nasional

Teori kepentingan nasional menyatakan bahwa setiap negara berusaha untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya, yang meliputi keamanan, kesejahteraan ekonomi, dan pengaruh internasional. Dalam konteks Indonesia, kepentingan nasional tercermin dalam kebijakan luar negeri yang berfokus pada stabilitas regional, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan terhadap kedaulatan negara. Indonesia, dengan posisi geografis dan politiknya yang strategis di kawasan Indo-Pasifik, menggunakan diplomasi pertahanan untuk melindungi kepentingan nasionalnya melalui penguatan hubungan militer dengan negaranegara besar, serta melalui keterlibatan aktif dalam forum-forum pertahanan multilateral (Wahyuni, 2024).

Teori Kebijakan Luar Negeri

Teori kebijakan luar negeri menyoroiti bagaimana negara menentukan strategi dan tindakan luar negerinya berdasarkan perimbangan kepentingan domestik, geopolitik, dan hubungan internasional. Dalam hal ini, Indonesia, melalui kebijakan luar negerinya yang bebas-aktif, memformulasikan strategi diplomasi pertahanan yang sesuai dengan dinamika global dan regional. Kebijakan ini memungkinkan Indonesia untuk tetap netral dalam konflik besar namun tetap aktif berpartisipasi dalam pertemuan internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan regional (Halim, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian kawasan Asia Tenggara antara netralitas dan keterlibatan strategis. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia pada periode 2023-2025, serta mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dalam respons Indonesia terhadap dinamika geopolitik regional. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menggali makna dari kebijakan diplomasi pertahanan yang diterapkan oleh Indonesia dalam konteks yang kompleks dan penuh ketidakpastian (Baxter & Jack, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik diplomasi pertahanan Indonesia. Dokumen yang digunakan meliputi dokumen resmi dari lembaga pemerintah Indonesia, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, TNI, dan Bakamla, yang mencakup kebijakan dan pernyataan publik. Selain itu, dokumen dari ASEAN, seperti pertemuan ADMM dan ADMM-Plus, juga digunakan untuk memahami posisi Indonesia dalam kerangka diplomasi pertahanan regional. Laporan dari lembaga internasional terkait keamanan dan pertahanan serta artikel jurnal akademik juga dijadikan referensi untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai diplomasi pertahanan Indonesia. Berita dan analisis media daring yang kredibel juga menjadi sumber penting untuk menilai dinamika kebijakan Indonesia dalam merespons isu-isu aktual di kawasan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen, laporan, publikasi ilmiah, serta berita yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber dilakukan dengan kriteria relevansi terhadap isu diplomasi pertahanan Indonesia, kredibilitas sumber, serta periode waktu 2023-2025. Proses ini memastikan bahwa data yang terkumpul merupakan informasi terkini dan mencerminkan kebijakan Indonesia dalam konteks regional yang sedang berkembang. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyusun gambaran yang lebih akurat mengenai diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian kawasan.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan dua teknik utama, yaitu analisis tematik dan analisis isi (content analysis). Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang terkumpul, sementara analisis isi bertujuan untuk menilai makna dan pesan yang terkandung dalam dokumen dan sumber lainnya. Selain itu, triangulasi sumber digunakan untuk memvalidasi temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih kredibel dan dapat dipercaya. Dengan menggunakan metode-metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai diplomasi pertahanan Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik kawasan Indo-Pasifik antara netralitas dan keterlibatan strategis pada periode 2023-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tetap teguh

pada kebijakan luar negeri bebas dan aktif, yang memungkinkan negara ini menjaga netralitas di tengah persaingan global yang meningkat. Meski begitu, Indonesia tetap terlibat dalam kerjasama dengan negara-negara besar dalam forum multilateral guna memperkuat stabilitas regional tanpa terjebak dalam aliansi militer yang berisiko mengancam independensinya. Diplomasi pertahanan Indonesia tercermin dalam partisipasi aktif dalam latihan militer bersama dan forum-forum seperti ADMM-Plus.

Ketidakpastian yang melanda kawasan Indo-Pasifik, ditandai oleh persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta klaim wilayah di Laut China Selatan (Wicaksana, 2025b; Mamentu et al., 2023a), merupakan tantangan utama yang dihadapi Indonesia. Faktor VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) menambah tingkat kesulitan dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan diplomasi pertahanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harus membuat kebijakan yang fleksibel dan adaptif untuk menanggapi perubahan aliansi internasional, ketegangan antara kekuatan besar, dan ancaman baru seperti perubahan iklim yang mempengaruhi stabilitas kawasan.

Dalam konteks kerjasama keamanan regional, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara netralitas dan keterlibatan dalam kerjasama pertahanan. Meski Indonesia tidak terikat dalam aliansi militer besar, diplomasi pertahanannya aktif melalui berbagai forum seperti ADMM-Plus, yang melibatkan negara-negara ASEAN dan mitra dialog internasional, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok. Partisipasi dalam forum ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan tanpa terjebak dalam polarisasi internasional yang berpotensi membahayakan independensinya.

Strategi diplomasi pertahanan Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, yang mencakup keamanan, kesejahteraan ekonomi, dan pengaruh internasional. Dalam menghadapi ketidakpastian global dan regional, Indonesia memformulasikan kebijakan luar negeri yang dapat menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan kerjasama internasional. Keputusan diplomasi pertahanan Indonesia tidak hanya mengutamakan stabilitas kawasan tetapi juga memprioritaskan penguatan hubungan bilateral dan multilateral yang dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Akhirnya, validasi temuan penelitian ini melalui triangulasi sumber memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia. Dengan menggabungkan dokumen resmi, laporan internasional, serta analisis media yang kredibel, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik. Kesimpulannya, diplomasi pertahanan Indonesia di tengah ketidakpastian kawasan ini menekankan pentingnya kebijakan luar negeri yang fleksibel, proaktif, dan mampu melindungi kepentingan nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif.

5. KESIMPULAN

Diplomasi pertahanan Indonesia pada periode 2023-2025 menghadapi tantangan besar akibat ketidakpastian geopolitik yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik, yang dipicu oleh rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta ketegangan teritorial di Laut China Selatan. Meskipun dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks, Indonesia tetap mempertahankan prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif, yang memungkinkan negara ini untuk menjaga netralitas sambil tetap terlibat dalam kerjasama keamanan regional. Diplomasi pertahanan Indonesia dirancang untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk keamanan maritim, dengan mengutamakan kebebasan navigasi di jalur perdagangan vital seperti Selat Malaka dan Laut China Selatan. Melalui berbagai forum multilateral, seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus), Indonesia berusaha memperkuat stabilitas kawasan tanpa terlibat dalam aliansi militer yang dapat merusak independensinya.

Dalam menghadapi ketidakpastian yang dipicu oleh faktor VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity), Indonesia menekankan pentingnya kebijakan luar negeri yang fleksibel dan responsif. Diplomasi pertahanan Indonesia tidak hanya berfokus pada penguatan hubungan bilateral dan multilateral, tetapi juga pada pengelolaan ketegangan regional serta upaya untuk menjaga kestabilan kawasan. Keputusan diplomasi pertahanan yang diambil Indonesia mencerminkan komitmennya untuk melindungi kepentingan nasional sambil menjaga hubungan internasional yang strategis. Dalam konteks ini, Indonesia berupaya untuk tetap relevan di kancah internasional tanpa mengorbankan prinsip dasar kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, yang menjadi landasan bagi stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

6. REFERENSI

- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559.
- Bellamy, A. (2011). *Military diplomacy: The role of military power in international politics*. Cambridge University Press.
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Security in a changing world: The role of defense diplomacy*. Oxford University Press.
- Goh, E. (2023). Rising tensions in the Indo-Pacific: The U.S.-China rivalry and its implications. *Journal of International Relations*, 58(3), 12–25.
- Halim, M. (2025). Indonesia's foreign policy: Balancing neutrality and engagement. *Indonesian Foreign Policy Journal*, 12(1), 34–56.
- Kamil, A. (2022). Indonesia's foreign policy and security in the era of Indo-Pacific tensions. *Indonesian Review of International Studies*, 45(2), 98–114.
- Kaplan, R. D. (2023). The age of uncertainty: The VUCA world and global security. *Global Policy Review*, 29(1), 45–58.
- Laksmiana, E. A. (2023). *Foreign Policy*.
- Mamentu, M., Rares, J. J., & Londong, V. Y. (2023a). *Amplifying Indonesia's Defence Diplomacy in ASEAN*.
- Mamentu, M., Rares, J. J., & Londong, V. Y. (2023b). *Indonesian Foreign Policy in Encouraging the Acceleration of Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.
- Manurung, H., Rezasyah, T., & Prihantoro, M. (2025). *Challenges of Indonesian Defense Diplomacy*.
- Rini, A. (2022). *Indonesia's free and active foreign policy in the 21st century: Challenges and opportunities*. Pustaka Akademika.
- Setiawan, D. (2023). *The evolving Indonesian defense strategy: From national defense white paper to RPJM*. Indonesian Defense Publications.
- Sugianto, T. (2023). ASEAN and regional security: The role of ADMM-Plus in promoting peace. *Southeast Asian Journal of International Relations*, 29(3), 101–121.
- Wahyuni, F. (2024). National interest and diplomacy: Indonesia's strategic approach in the Indo-Pacific. *Journal of Global Security Studies*, 8(2), 45–67.
- Wicaksana, I. G. W. (2025a). *Indonesia's Foreign Policy: The Need for a New Approach*.
- Wicaksana, I. G. W. (2025b). *Indonesia's New Partial Multialignment Strategy*.